

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan perekonomian negara salah satunya ditentukan dengan pertumbuhan ekonomi. Ukuran ini menekankan perhatiannya pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat akibat dari perkembangan kegiatan perekonomian. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan berbagai masalah pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2005).

Tingkat pertumbuhan PDB, secara keseluruhan maupun per kapita merupakan ukuran pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional. Namun, pandangan yang bertujuan pada angka pertumbuhan ekonomi dalam membangun perekonomian suatu negara mulai menuai banyak kritik dan mendapatkan masukan, sehingga memicu munculnya pandangan-pandangan baru dalam pembangunan ekonomi. Pengentasan kemiskinan menjadi faktor penting lainnya selain peningkatan PDB dalam membangun ekonomi suatu negara.

Negara berkembang pada umumnya memiliki karakteristik perekonomian yang hampir sama, seperti tingkat pendapatan yang rendah, sistem pendidikan serta kondisi kesehatan yang kurang memadai, tingkat produktivitas yang rendah, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan tersedianya lapangan kerja

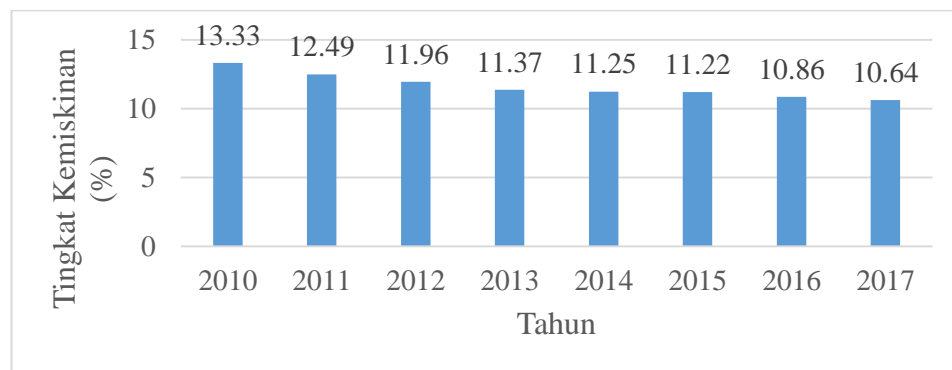
merupakan anggapan dari pandangan ekonomi baru dalam tujuan pembangunan ekonomi, bukan hanya sekadar pertumbuhan PDB. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Mengatasi masalah kemiskinan merupakan salah satu keberhasilan suatu perekonomian, selain peningkatan PDB. Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta memenuhi standar-standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan merupakan tujuan negara-negara berkembang (Todaro & Smith, 2012).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Hal tersebut perlu diatasi secara menyeluruh. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merencanakan tingkat kesejahteraan yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan potensi ekonomi di Indonesia secara efisien, diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta kemajuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan merupakan beberapa fokus utama dalam RPJMN (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Saat ini, Indonesia telah menerapkan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Potensi daerah masing-masing dapat dikelola secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur hal tersebut. Termasuk juga dalam hal kebijakan, pemerintah daerah dapat mengatur sumber-sumber ekonomi agar dimanfaatkan secara efisien melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang desentralistik diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat miskin yang harapannya akan mengurangi masyarakat miskin melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Grafik 1.1. Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Hal tersebut, nyata dan ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 – 2017 seperti yang terlihat pada Grafik 1.1. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 13,33%, kemudian pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 12,49%, selanjutnya pada tahun 2012 tingkat kemiskinan turun menjadi 11,96% hingga pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10.64%. Daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi menjadi sasaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Padahal, pembangunan ekonomi terpusat di Pulau Jawa.

Pada Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa pada tahun 2017. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi yaitu 4.617.010 jiwa pada Maret 2017 dan 4.405.270 jiwa pada September 2017. Kemudian di urutan selanjutnya adalah Jawa Tengah dengan

jumlah penduduk miskin sebanyak 4.450.720 jiwa pada Maret 2017 dan 4.197.490 jiwa pada September 2017.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017
(Ribuan Jiwa)

Provinsi	Maret 2017	September 2017
Aceh	872.61	829.80
Sumatera Utara	1453.87	1326.57
Sumatera Barat	364.51	359.99
Riau	514.62	496.39
Jambi	286.55	278.61
Sumatera Selatan	1086.92	1086.76
Bengkulu	316.98	302.62
Lampung	1131.73	1083.74
Kep. Bangka Belitung	74.09	76.20
Kep. Riau	125.37	128.43
DKI Jakarta	389.69	393.13
Jawa Barat	4168.44	3774.41
Jawa Tengah	4450.72	4197.49
Di Yogyakarta	488.53	466.33
Jawa Timur	4617.01	4405.27
Banten	675.04	699.83
Bali	180.13	176.48
Nusa Tenggara Barat	793.78	748.12
Nusa Tenggara Timur	1150.79	1134.74
Kalimantan Barat	387.43	388.81
Kalimantan Tengah	139.16	137.88
Kalimantan Selatan	193.92	194.56
Kalimantan Timur	220.17	218.67
Kalimantan Utara	49.47	48.56
Sulawesi Utara	198.88	194.85
Sulawesi Tengah	417.87	423.27
Sulawesi Selatan	813.07	825.97
Sulawesi Tenggara	331.71	313.16
Gorontalo	205.37	200.91
Sulawesi Barat	149.76	149.47
Maluku	320.51	320.42
Maluku Utara	76.47	78.28
Papua Barat	228.38	212.86
Papua	897.69	910.42

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2. Persentase Kemiskinan Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	3.48	3.75	3.69	3.55	3.92	3.93	3.75	3.77
Jawa Barat	11.27	10.65	10.09	9.52	9.44	9.53	8.95	8.71
Jawa Tengah	16.56	15.76	15.34	14.56	14.46	13.58	13.27	13.01
DI Yogyakarta	16.83	16.08	16.05	15.43	15	14.91	13.34	13.02
Jawa Timur	15.26	14.23	13.4	12.55	12.42	12.34	12.05	11.77
Banten	7.16	6.32	5.85	5.74	5.35	5.9	5.42	5.45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.2. yang menunjukkan persentase kemiskinan di Pulau Jawa, bila kita bandingkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, ternyata persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta menempati urutan pertama pada tingkat kemiskinan. Namun, bila dibandingkan jumlah penduduknya, lebih banyak penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari pada Provinsi DI Yogyakarta.

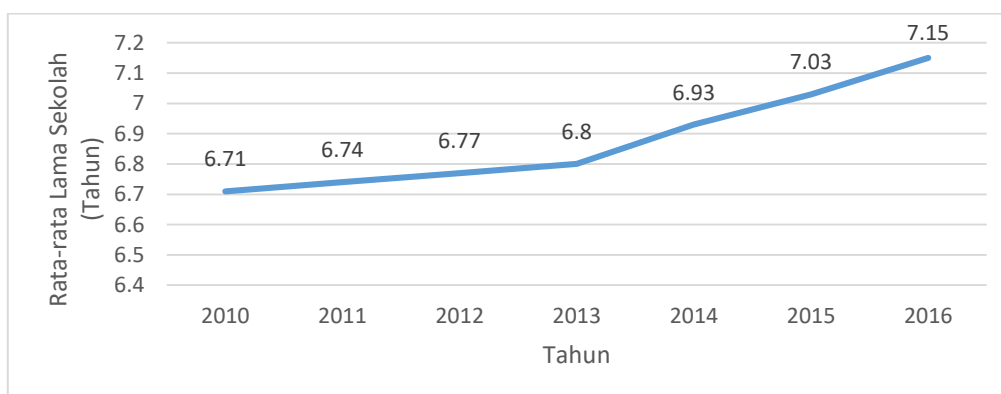
Pemerintah harus menyadari bahwa pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan perlu ditujukan pada pembangunan daerah khususnya daerah yang tertinggal sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pemicu timbulnya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan terjadinya perlambatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akses terhadap pendidikan

masih tersebar secara tidak merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian padahal untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan diperlukan pendidikan yang memadai (*World Bank*, 1999). Tingkat pendidikan yang semakin baik dapat membantu keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Mengukur tingkat pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Seseorang yang menempuh pendidikan lebih lama memiliki pengetahuan yang lebih dan akan berguna untuk masa yang akan datang. Orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan (Njong, 2010).

Pada Grafik 1.2. ditunjukkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan secara terus-menerus mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah adalah 6,71 tahun. Kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 6,74 tahun. Selanjutnya terjadi kenaikan kembali pada tahun 2012 hingga pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah adalah 7,15 tahun.

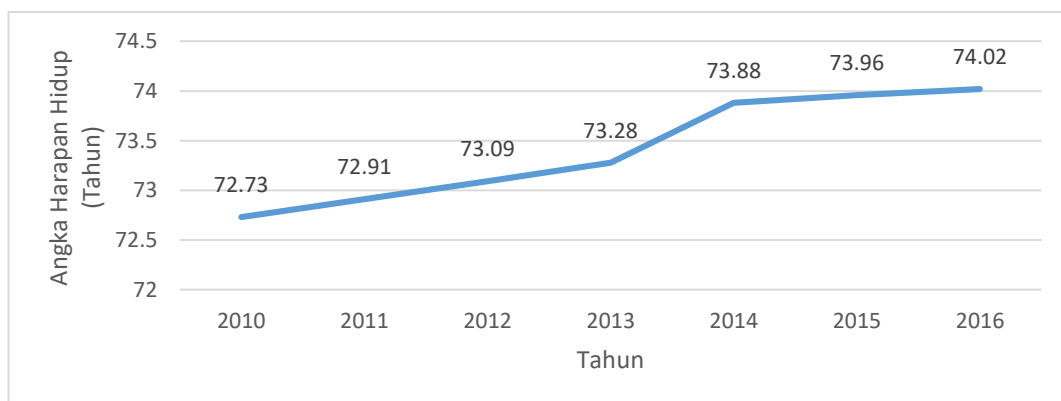
Grafik 1.2. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

Selain tingkat pendidikan, kemiskinan juga dipengaruhi dari sisi kesehatan. Hal ini berkaitan dengan produktivitas seseorang. Individu yang sehat tentunya akan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan individu yang tidak sehat sebenarnya masih bisa bekerja tetapi tidak seproduktif individu yang sehat, bahkan bila dalam keadaan yang sudah parah, tidak mungkin individu tersebut bekerja dan pada akhirnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Tingkat kesehatan dapat diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Grafik 1.3. Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

Grafik 1.3. menunjukkan angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2016. Sama seperti rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, angka harapan hidup di Jawa Tengah adalah 72,73 tahun. Selanjutnya mengalami

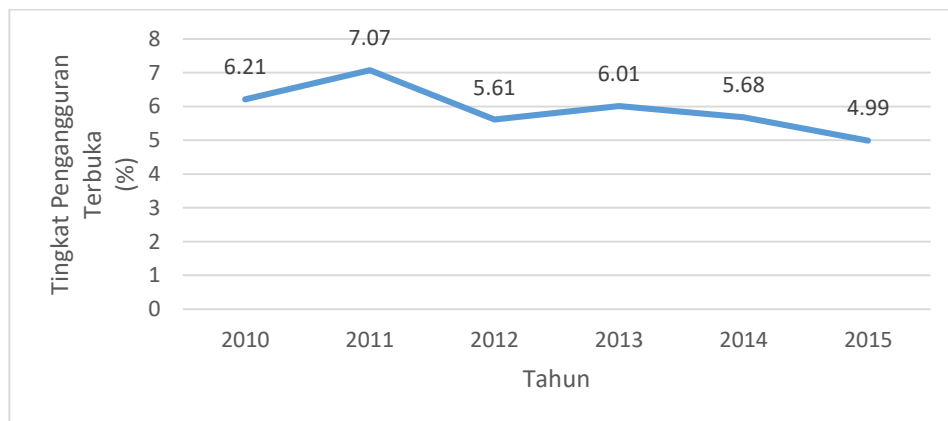
peningkatan pada tahun 2011 menjadi 72,91 tahun. Kemudian terjadi kenaikan di setiap tahunnya pada tahun 2012 hingga pada tahun 2016 angka harapan hidup di Jawa Tengah mencapai 74,02 tahun.

Perlunya memerhatikan tingkat pendidikan dan kesehatan karena keduanya ada kaitannya dengan kemampuan pada saat bekerja dan produktivitas. Seseorang yang lebih sehat biasanya lebih produktif dalam bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah dalam menghadapi persaingan pasar tenaga kerja karena pengalaman dasar yang sudah didapatkan ketika menempuh pendidikan. Individu yang kalah dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan akan mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat. Tingkat pengangguran dapat didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Semakin banyak angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, akan mengakibatkan penurunan pendapatan dan konsumsi. Apabila penurunan pendapatan sudah sampai pada tingkat yang mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar di tempat tinggal yang bersangkutan, maka pengangguran sudah sampai pada tahap menaikkan tingkat kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada tahun 2010 hingga 2015 namun cenderung mengalami *trend* penurunan. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1.4., pada tahun 2010, tingkat pengangguran di Jawa Tengah sebesar 6,21%. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah meningkat pada tahun 2011 menjadi 7,07%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 5,61%. Tetapi, pada tahun 2013 tingkat pengangguran di Jawa Tengah

mengalami kenaikan menjadi 6,01%. Namun, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan masing-masing menjadi 5,68% dan 4,99%. Perlunya perhatian pemerintah dan perusahaan dalam membuka lapangan kerja di Jawa Tengah agar tingkat pengangguran relatif stabil, tidak mengalami pelonjakan secara signifikan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula tingkat kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak bekerja.

Grafik 1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

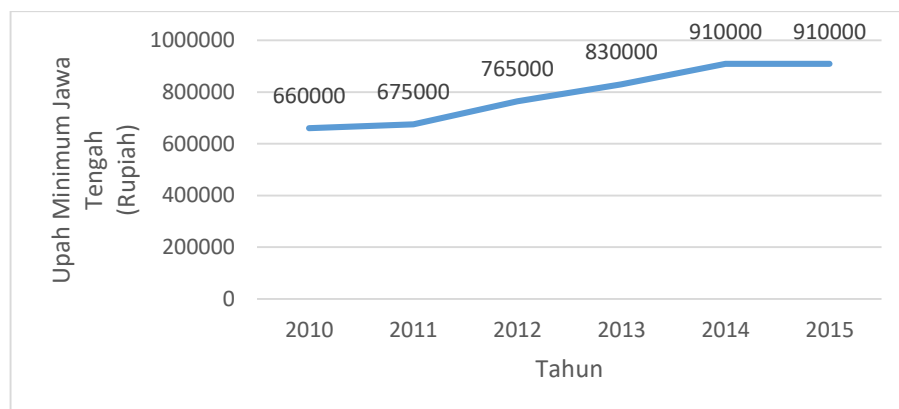
Kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah merupakan cerminan dari pendapatan yang rendah serta standar hidup yang buruk yang dialami oleh penduduk miskin yang dapat menurunkan produktivitas mereka sehingga pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2012).

Menurut Todaro dan Smith (2012) kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal akan terdorong seiring dengan peningkatan pendapatan golongan miskin yang dapat membuat distribusi pendapatan yang lebih merata

sehingga akan menyebabkan terjadinya perbaikan gizi, lapangan kerja yang lebih luas, dan pertumbuhan output yang lebih tinggi.

Gagasan upah minimum sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an yang bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003).

Grafik 1.5. Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

Berdasarkan Grafik 1.5., terlihat kenaikan upah minimum provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010. Hanya saja, pada tahun 2015 upah minimum provinsi Jawa Tengah tidak mengalami kenaikan dari tahun 2014. Pada tahun 2010, upah minimum provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 660.000,-. Kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 675.000,-. Selanjutnya, pada tahun 2012, upah minimum provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 765.000,-. Upah minimum Provinsi Jawa Tengah terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp 910.000,-

Berbagai hal yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa ada berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah di antaranya Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per kapita, pendidikan dan kesehatan yang kaitannya dalam persaingan tenaga kerja serta produktivitas untuk menghasilkan output yang juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tingkat pengangguran, serta upah minimum dalam rangka memenuhi kebutuhan dan standar-standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan. Hal tersebut menjadi fenomena dalam penelitian ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh PDRB per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan indikator permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyusun kerangka perencanaan dan pola kebijakan pembangunan daerah sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai secara optimal.
2. Dapat memberikan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan bahan evaluasi kebijakan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memacu peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, serta penentuan upah minimum.
3. Bagi peneliti, penelitian dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.